



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1957

TENTANG

**PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN
PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG
MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri/dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut.

BAGIAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAGIAN IVA
URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN
PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN
(PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI
PENGURUS SENDIRI

BAB I (Pengeluaran)

4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat ...	734 504 900
4A.2 Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan	138 000 000
4A.3 Pengeluaran berkenaan dengan cadangan dari untung yang timbul karena penetapan baru da- dari harga persediaan emas Bank Indonesia	Memori
4A.4 Pengeluaran berhubungan dengan pembelian alat- alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri, kepunyaan daerah-daerah Swatantra ..	20 000 000
4A.5 Penyertaan-penyertaan	170 850 000
4A.6 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan Pemerintah	250 000
4A.7 Uang muka untuk perlengkapan kebutuhan-kebu- tuhan kas	588 000 000
4A.8 Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrij- venwet	657 642 550
4A.9 Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka ...	Memori

Jumlah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jumlah 2 309 247 450

(Dua milyar tiga ratus sembilan juga dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

BAB II (Penerimaan)

4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8.

4A.1 .1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4.

4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.

2 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mata-anggaran-anggaran tersebut di atas.

4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit Luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.

4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim.

2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.

4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit Luar Negeri.

4A.1.3.1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan ECA-grants (Counterpartfund).

2 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan TCA.

4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.

4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom) serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen).

4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.

4A.1.5.1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.

la Penerimaan berkenaan dengan pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 1953 termasuk di dalam pinjaman atas beban m.a. 4A.2.1.1.

4A.2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.

4A.2.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.

4A.2.1.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.

2Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.

4A.3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH-DAERAH SWATANTRA (OTONOM) YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.

4A.3.1 Penerimaan berhubungan dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan efek- efek.

4A.3.1.1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan-pendapatan efek-efek.

4A.3.2 Penerimaan berhubungan dengan penjualan kumpulan surat-surat efek-efek sebelum dan sesudah perang.

4A.3.2.1 Penghasilan dari penjualan surat-surat efek.

4A.3.3 Penerimaan berhubungan dengan pembayaran oleh daerah-daerah Swatantra (otonom) rendahan, 1e karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah-daerah Swatantra (otonom) yang - telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan.

4A.3.3.1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari kabupaten-kabupaten dan kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953.

4A.3.3.2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut, yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 - 12 - 1953 oleh daerah-daerah Swatantra (otonom).

3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.

4A.4 ...